# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menunjang hak dan kewajiban warga Negara, karena itu pemerintah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi rakyatnya yang merupakan peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega merupakan suatu instansi yang bergerak dalam bidang perpajakan. Dimana dalam kantor terdapat beberapa divisi, dan berperan penting dalam masalah perpajakan. Penerimaan negara terdiri dari pajak dan bukan pajak. Penerimaan negara yang berasal dari pajak menjadi sumber pendapatan negara yang sangat berpengaruh bagi kelancaran pembangunan bangsa Indonesia. Namun, bagi sebagian orang, masalah pajak merupakan hal yang rumit padahal jika dapat ditelaah dengan baik dan seksama maka pajak tidaklah terlalu rumit.

Pemerintahan akan berkembang dengan baik jika masyarakatnya patuh dan sadar akan peraturan yang berlaku pada pemerintahan tersebut, salah satunya dalam membayar pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak negara, karena dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan yang lebih besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan sistem *Self Assesment.*

Dengan adanya *Self Assesment System,* dimana pemerintah berperan penting dalam melakukan pengawasan dengan adanya pemeriksaan/penyidikan dan penagihan pajak terhadap wajib pajak dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Sumber : Blog Alex King).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disisi lain masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditujukan melalui keikutsertaanya dalam pembiayaan negara. Maka, pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Rakyat yang ikut serta membayar pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tersebut. Wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Dalam pelaksanaan perpajakan biasanya penerimaan yang terjadi yang diperoleh

dari orang pribadi dan badan, untuk orang pribadi berasal dari pajak penghasilan, sedangkan untuk penerimaan pajak kepada negara yang berasal dari sebuah badan atau sebuah perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dari laba tersebutlah baru dapat dihitung untuk jumlah pajak untuk pemerintah. Dalam pelaksanaan perpajakannya ada perbedaan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak biasanya dalam melakukan pembayaran pajak sebisa mungkin dapat meminimalisasi beban pajak dengan cara meminimalisasi keuntungan laba perusahaan cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak kepada pemerintah baik secara *legal* maupun *illegal*. Berdasarkan informasi (http://Kliping/Bisnis_Dan_Ekonomi/24 Februari) diantara kedua jenis wajib pajak tersebut, untuk tarif PPh Wajib Pajak badan turun dari 30% menjadi 28% dan akan diturunkan lagi menjadi 25% pada tahun 2010. Dan berdasarkan informasi (http://acehprov.go.id/kepemerintahan) Wajib Pajak badan ternyata lebih sadar dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dibandingkan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Bagi wajib pajak, timbul permasalahan mengenai berapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran yang terjadi karena masih belum sadarnya wajib pajak atas kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kepada Negara dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu dengan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan pembayaran (Sumber: Stefanus Sirergar). Atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar seperti dengan sengaja

memanipulasikan total laba yang terjadi dalam perusahaan. Jika laba sebuah perusahaan mengahasilkan laba sekecil mungkin maka jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada Negara untuk pembayaran pajakpun menjadi sekecil mungkin, dan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan Negara atas kewajiban untuk menyetorkan pajak yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan.

Jika terjadi memanipulasikan data dengan kesengajaan yang bertujuan untuk melakukan pembayaran pajak yang dapat membuat pembayaran pajak menjadi seefisien mungkin. Atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam kurun waktu tertentu, maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan yaitu dapat berupa sanksi denda, bunga, kenaikan.

Sanksi administrasi adalah merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi yang berupa denda dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terjadinya sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan dikarenakan adanya wajib pajak badan yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya wajib pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada Negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu atau melakukan pelanggaran atas kesengajaan menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan Negara (sumber:pajakonline.com/Ali Imran Hamid/19 Mei 2010). Agar wajib pajak tidak menghindar untuk membayar kewajibannya, maka lebih ditingkatkan dalam sosialisasi untuk masyarakat mengenai perpajakan, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti pajak, sehingga menghindari pajak. Sehingga petugas harus melakukan penelitian dan pemeriksaan setelah Surat Pemberitahuan (SPT) diterima, lalu melihat kelengkapan atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) belum lengkap, karena agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan. Dan pada akhirnya petugas pajak harus lebih teliti dalam melaksanakan pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan data kedalam computer untuk penyampaian ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Seharusnya wajib pajak sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, meskipun pajak bersifat paksaan namun wajib pajak harus membayar pajak dengan kesadaran yang tinggi dan lebih meresap dalam diri masing-masing, wajib pajak membayar kewajibannya yaitu membayar pajak bukan karena takut terkena

sanksi pajak ataupun karena terpaksa. Dengan demikian supaya sistem *Self Assesment* dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka harus dikenakan sanksi khususnya sanksi administrasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sanksi administrasi khususnya sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan, maka penulis mengambil judul :

**"Tinjauan Atas Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega"**

## 1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Adapun identifikasi masalah dan perumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Administrasi disebabkan karena adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan.
2. Adanya pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu.
3. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti pajak, sehingga menghindari pajak.

### 1.2.2 Perumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam melakukan perencanaan dan perancangan penelitian diperlukan suatu perumusan dari masalah-masalah yang ada, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.
2. Dokumen apa yang digunakan dalam sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.
3. Kendala dan upaya apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dalam penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis mempunyai maksud dan tujuan dalam penelitian tentang penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega yaitu sebagai berikut :

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini mengenai penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.
2. Untuk mengetahui dokumen apa yang digunakan dalam penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dalam penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi akademis dan praktis, sebagai berikut :

### 1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu yang didapat dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan. Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

   Diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan tentang bidang ilmu yang terkait, seperti Metodologi Penelitian dan Perpajakan khususnya sanksi administrasi pajak penghasilan badan. Serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi pembanding atau informasi bagi rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi dan dapat diaplikasikan dalam mata kuliah perpajakan.

2. Bagi Penulis

   Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Terutama mengenai penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan bagi wajib pajak badan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penulis berharap dapat memberikan informasi bagi pembaca yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegalega

Bentuk rekomendasi bagi instansi untuk dapat mengimplementasikan sanksi administrasi terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan dengan baik agar tercapainya efektifitas pengurangan tindak pidana dan pelanggaran pajak yang ada sehingga hak dasar rakyat dan kesejahteraannya dapat tercapai.

2. Bagian Pengawasan dan Konsultasi III

   Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan sanksi administrasi dalam bidang perpajakan, dan diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan menambah informasi bagi instansi guna mengevalusi kembali mengenai khususnya penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan bagi wajib pajak badan.

## 1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk pelaksanaan penelitian tugas akhir adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung.

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian untuk penelitian adalah mulai dari Maret sampai dengan Juli 2010. Adapun Tabel waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Kegiatan Penelitian**

| No | Kegiatan | Maret 2010 | | | | April 2010 | | | | Mei 2010 | | | | Juni 2010 | | | | Juli 2010 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Tahap Pertama :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengambilan surat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Surat menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Tahap pelaksana :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Mengajukan surat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Mengajukan penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Melaksanakan penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Tahap Pelaporan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Bimbingan Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Usulan Penelitian Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Proposal Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pengajuan Bab 1 & Revisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pengajuan Bab 2 & Revisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pengajuan Bab 3 & Revisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pengajuan Bab 4 & Revisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pengajuan Bab 5 & Revisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Pelaporan Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |